

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung)

Hidayat dan Rana Sutrisna

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: hidayat_dr@ymail.com / rana_sutrisna35@gmail.com

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencemaran utama Sungai Citarum di bagian hulu berasal dari industri tekstil di daerah industri Majalaya sebagai akibat sebagian industri tekstil terbiasa membuang limbah ke Sungai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis implementasi kebijakan dan peran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator, Communication (Komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi), dan Buraucraticc the Structure (struktur birokrasi) dalam pengelolaan limbah cair industri di Kecamatan Majalaya Kabupaten. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang strategis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung khususnya proses pengendalian limbah cair. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri di Wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2010 serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.

Kata Kunci : Peran, Strategi, Kebijakan, Pembangunan, Pengawasan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Kabupaten Bandung khususnya di Wilayah Kecamatan Majalaya meningkat cukup tajam seperti jumlah industri yang ada di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah 66 industri. Berdasarkan data dari Kecamatan Majalaya terdapat tambahan 18 industri lain yang tidak terdaftar. Makin meningkatnya kegiatan pembangunan Industri di berbagai sektor di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, maka akan menyebabkan meningkatnya pula dampak terhadap lingkungan hidup, Selain itu letak Kabupaten Bandung yang berdekatan dengan Kota Bandung, dan Kota Cimahi memiliki konsekuensi logis bagi Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk turut berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kedua kota tersebut dan aktivitas Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sendiri, untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan itu, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dituntut untuk melakukan eksplorasi serta eksploitasi potensi sumber daya alam yang tersedia serta menjadi tempat berbagai aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dimana Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dalam bidang lingkungan hidup antara lain tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan hukum

dan kemitraan lingkungan. Dalam rangka menghindari terjadinya polusi dan kontaminasi pada sumber air akibat pembuangan limbah cair yang mengandung B3 sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu diatur proses pengendaliannya melalui sebuah kebijakan, dengan demikian oleh Pemda Kabupaten Bandung telah mengeluarkan suatu kebijakan pada sektor lingkungan hidup yaitu telah menetapkan Perda Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. Semua dampak itu sulit untuk dihindari atau ditiadakan sepanjang masih lemahnya perhatian semua pihak untuk mengimplementasikan semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota, khususnya implementasi kebijakan pengendalian limbah cair.

Implementasi terhadap kebijakan ini harus secara aktif melibatkan birokrasi, swasta, masyarakat, LSM dalam setiap aspek kehidupan dan kegiatan atau usaha. Hal ini sangat penting dan *urgent* mengingat bahwa lingkungan hidup sekarang adalah milik generasi akan datang yang adalah pewaris masa depan bangsa dan negara di daerah khususnya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Mayoritas jenis kegiatan industri di Majalaya adalah industri yang bergerak dalam bidang tekstil, meskipun terdapat industri yang bergerak diluar tekstil, namun jumlah dan kegiatan ini tidak begitu banyak. Sungai Citarum atau anak sungainya. Air limbah industri yang berasal dari pabrik-pabrik industri tekstil tersebut dialirkan melalui saluran terbuka atau perpipaan ke saluran irigasi atau saluran penampung lain yang bermuara ke Sungai

Citarum atau melalui anak-anak sungai Citarum seperti Ciwalengke, Cikacembang, Cipadaulun dan Cijunti kondisi beberapa anak Sungai Citarum.

Sumber pencemaran utama Sungai Citarum di bagian hulu berasal dari industri tekstil di daerah industri Majalaya, industri tekstil tersebut meliputi industri tekstil skala menengah maupun kecil. Industri-industri tekstil terletak di pinggir kota yakni di sebelah barat Sungai Citarum, sedangkan sebagian kecil lainnya terletak di pinggir Sungai Citarum sebelah timur. Industri tekstil menimbulkan permasalahan lingkungan bagi Sungai Citarum. Hal ini diakibatkan oleh sebagian industri tekstil terbiasa membuang limbah ke Sungai. Semua dampak itu sulit untuk dihindari atau ditiadakan sepanjang masih lemahnya perhatian semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan harus secara aktif melibatkan birokrasi, swasta, masyarakat, LSM dalam setiap aspek kehidupan dan kegiatan. Hal ini sangat penting dan urgen mengingat bahwa lingkungan hidup sekarang adalah milik generasi akan datang yang adalah pewaris masa depan bangsa dan negara di daerah khususnya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Friedrich dalam Lubis (2007:7) adalah “serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukan

hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan menunjuk pokok-pokok dalam suatu kebijakan adalah tujuan (*goals*) sasaran (*objectives*) dan kehendak (*purpose*.” Sedangkan Anderson dalam Hosio (2006:2) mendefinisikan bahwa “*policy is the relationship of A government unit to its Environment*” Nugroho (2004:103) mengemukakan kebijakan publik dilahirkan dalam bentuk produk legislasi tertentu dan pada hakekatnya adalah keputusan penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini keputusan bisa berisi tidak adanya persetujuan, namun demikian kebijakan seringkali sulit dipahami oleh publik karena keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan untuk mengikuti kebijakan publik tersebut sehingga sulit diimplementasikan.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:146) bahwa “Implementasikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.” Dalam praktek implementasikan kebijakan pada umumnya dipilih dari berbagai model sebagaimana pendapat Nugroho (2004:164) dilukiskan bahwa “implementasi kebijakan yang berpola dari atas kebawah (*top-bottom*)”

versus dari bawah keatas (*bottom-topper*) dan pola pemilahan imlementasi yang berpola paksa (*command and control*) dalam penerapan kebijakan prosesnya bisa dari bawah sehingga tercipta partisipasi publik dan diharapkan akan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebagai implementasi kebijakan yang responsif.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang sangat kritis dan strategis, sebagaimana dikemukakan Edwards III dalam Tachjan (2008:56) bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor : 1) *Communication*, 2) *Resources*, 3) *Disposition*, 4) *Bureaucratic the structure*. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*) :

Menurut Edwards III dalam Winarno (2008:175) bahwa faktor komunikasi ini penting agar pelaksanaan kebijakan bisa efektif dan mereka yang akan melaksanakan keputusan harus dapat mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan harus disampaikan kepada pelaksana dengan tepat sebelum mereka melaksanakannya. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi menurut Edwards III dalam Winarno (2008:175) adalah : 1)

Tranmission (penyampaian), 2) *Clarity* (kejelasan), 3) *Concistency* (kemantapan), Ketiga unsur-unsur tersebut dilaksanakan dengan saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Sumber Daya (*Resources*) :

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang penting agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko (1995:233) bahwa “Sumber data terpenting dalam sautu organisasi adalah sumber daya manusia orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka kepada organisasi. Beberapa tugas-tugas kepemimpinan kritis manajer mencakup penarikan, penyeleksian, pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi tanpa orang-orang yang cakap organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuan.”

3. Disposisi (*Disposition*) :

Menurut Edwards III dalam Winarno (2008:194) unsur-unsur penting dalam disposisi adalah : 1) *Effect of Disosition*, 2) *Staffing the bureaucracy*, 3) *Incentives*.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic the Structure*)

Ada 2 (dua) hal penting dalam struktur birokrasi menurut Edwards III dalam Winarno (2008:203-204) yaitu : 1) *Standrad Operating Procdures* (SOP). 2) *Fragmentation* yaitu tata cara yang lazim sebagai petunjuk pelaksanaan unit organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan.

d. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan di rubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di katakana dalam Pasal 1 Ayat 1 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menjaga mutu dan keseimbangan kualitas lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia agar dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung khususnya dalam pengelolaan limbah cair industri yaitu diterbitkan Perda Kabupaten Bandung No.7 tahun 2010, perlu diperhatikan faktor-faktor strategis

antara lain :

1. Kebijakan yang disusun harus mengkondisikan untuk tumbuhnya kesadaran masyarakat, swasta untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah cair industri untuk menciptakan kualitas lingkungan
2. Organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri yaitu Dinas Lingkungan Hidup, BPMP sebagai perijinan, serta dinas-dinas lain bersama LSM,Swasta/perusahaan dan Masyarakat.
3. Faktor lingkungan berupa kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal ini perlu dukungan penuh masyarakat unuk terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang baik serta kondisi ekonomi dimana pengelolaan limbah cair industri membutuhkan dukungan pembiayaan (keuangan) yang besar dari masyarakat dan memungkinkan terbukanya pekerjaan baru bagi para warga setempat.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi / pengamatan, *interview*/wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

6. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Cair Industri yang ditinjau dari permasalahan diantaranya Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi dan Disposisi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Salah satu faktor yang berperan dalam proses implementasi kebijakan adalah komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penyampaian informasi oleh pimpinan kepada staf guna implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung, sebagian informan menyatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya kemauan baik oleh pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian limbah cair guna meningkatkan kualitas Lingkungan hidup daerah. Hal ini ditunjukkan dengan pimpinannya sering melakukan komunikasi secara jelas dengan staf nya agar kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Para informan menyatakan bahwa komunikasi berjalan dengan jelas karena pimpinan sering melakukan rapat-rapat berkala pada setiap awal bulan. Mereka menyatakan sangat jelas karena setiap penjelasan dapat di pahami. Sebagian juga mengatakan cukup jelas demikian pula dengan frekwensi informasi sebagai informan mengatakan sangat jelas ada juga sebagian yang menjawab kurang jelas karena mereka sulit memahami pemasalahan lingkungan hidup. Untuk tingkat penerimaan informasi oleh pegawai, hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan sebagai besar informan menjawab baik namun sebagai besar yang kurang menerima karna kondisi latar belakang pendidikan yang berbeda serta tingkat pendidikan dan keahlian yang belum menyeluruh untuk seluruh staf.

Selain komunikasi antar pimpinan dengan staf juga terjadi komunikasi antar staf dengan staf atau antara kepala sub dinas dan kepala seksi yang satu dengan yang lain.

Hal ini di mungkinkan karena pegawai selalu menjalin kerjasama agar kebijakan sesuai perintah atasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan menyatakan baik karena komunikasi terus berlangsung secara baik. Sementara itu sebagian informan juga menyatakan bahwa tingkat komunikasi antar staf seringkali kurang berjalan dengan baik karena hampir personil disetiap sub unit kerja memiliki tingkat pendidikan dan latar belakang pribadi yang berlainan antara satu dengan yang lain.

Dalam pencegahan upaya pemecahan masalah dan pembuatan keputusan guna pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung pimpinan belum secara maksimal mendorong dan menggerakkan para pejabat eselon dibawahnya maupun para stafnya untuk berupaya bekerja lebih giat. Hasil wawancara dengan para informan terdapat keterangan bahwa keadaan koordinasi selalu baik karena ada komunikasi dan koordinasi sedangkan beberapa informan menjawab kurnag baik karena koordinasi hanya terjadi antara pimpinan dengan pejabat tertentu karena dianggap lebih memahami masalah lingkungan hidup.

Pimpinan juga berkewajiban untuk menjelaskan tujuan sebuah kebijakan kepada para pegawai sebagai unsur pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa informan menyatakan baik karena dapat dipahami dan sebagian mengatakan cukup untuk di pahami, demikian pula dengan pengulangan penyampaian informasi tentang keberadaan sebuah kebijakan, terdapat beberapa

informan yang mengatakan sangat baik, dan ada beberapa yang menjawab baik dan cukup baik.

Keterikatan para pegawai sebagai sesama aparatur dalam birokrasi, diperoleh data dari informan yang menjawab cukup baik, ada yang mengatakan baik dan sebagian yang menjawab cukup baik karena mereka memiliki kesamaan pengetahuan dan pengalaman yang sama terbatasnya dalam hal lingkungan hidup. Unsur informasi sebagai aspek yang menjadi salah satu inti dari pada komunikasi dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindak lanjut dengan pelaksanaan oleh aparat birokrasi. Untuk keperluan ini sangat diperlukan informasi yang, akurat dan efektif, karena jika tidak demikian aparat pelaksana kebijakan/keputusan akan melakukan kesalahan dalam melaksanakan kebijakan dan kebijakan akan mandek. Unsur lain dalam komunikasi adalah bagaimana kebijakan itu harus jelas kepada para pelaksana. Mereka sebagai para implementor harus memahami dengan jelas akan suatu kebijakan dari sisi ruang, tempat dan waktu pelaksanaan sebuah kebijakan. Unsur lain juga adalah konsistensi dan kepastian kebijakan bagi para pelaksana agar tidak menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam arti kebijakan harus pasti dan tidak menimbulkan keraguan dan pertanyaan yang sulit untuk dipahami.

Hasil penelitian memperlihatkan tentang peran komunikasi dimana secara keseluruhan, sebagian besar informan memberikan tanggapan baik dan sebagian kecil menjawab cukup terlaksana dengan baik. Hal ini berarti peran komunikasi telah

dapat berjalan dengan normal/baik dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian terhadap faktor sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung telah diperoleh data bahwa beberapa informan menjawab menandai, cukup memandai dan lainnya menjawab kurang memandai. Selain itu jumlah pegawai juga memberikan kontribusi penting terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa informan menjawab baik dan memandai, ada yang menjawab cukup dengan keterampilan pegawai yang belum mengerti tentang masalah lingkungan hidup. Demikian juga tentang biaya yang diperlukan sebagai informan menjawab baik dan telah tersedia karena terbangunnya fasilitas gedung dan peralatan lainnya termasuk kendaraan operasional namun sebagian menyatakan belum paham tentang bagaimana kegiatan operasionalnya nanti. Ketersediaan waktu untuk implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung cukup memadai namun sangat disayangkan karena seluruh waktu yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam operasional kegiatan rutin dinas. Demikian dengan ruang kantor juga telah memadai karena terdapat gedung kantor yang telah lengkap dengan fasilitas meubelairnya. Namun sebagian juga menjawab kurang baik karena sarana pendukung kegiatan kantor tersebut belum tersedia secara

menyeluruh untuk setiap sub unit kerja. Demikian pula telah tersedia satu unit gedung laboratorium yang masih dipersiapkan fasilitas meubelair dan peralatan laboratorium yang masih memerlukan tenaga pengguna yang harus terampil dan memahami baik pekerjaan laboratorium.

Aspek sumber daya dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal pengendalian limbah cair di Kabupaten Bandung dalam hal ini termasuk juga bagian yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian lebih serius. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek sumber daya dari sisi jumlah, kualitas, pembiayaan, dan pegawai berpengalaman sebagian besar informan menjawab cukup baik atau cukup memadai dalam artian perlu ada peningkatan dari sisi kualitas dan pengalaman demikian pula dengan sarana dan prasarana, ruang kantor dan waktu yang tersedia sebagian besar informan menjawab baik dan memadai sedangkan peralatan yang tersedia sebagian besar informan menjawab kurang memahami karena sedang dalam proses penyediaan dan belum bisa dimanfaatkan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah salah satu aspek penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran disposisi dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bandung khususnya untuk pengendalian limbah cair telah ditemukan data melalui informan

bahwa sebagian menjawab baik dan sebagian menjawab kurang baik memahami dengan baik karena dasar pendidikan yang berbeda dan mereka belum memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup. Demikian pula dengan kemampuan melaksanakan tugas sebagian informan menjawab baik, sebagian juga menjawab cukup baik dan sebagian lainnya menjawab kurang baik. Demikian pula dengan komitmen pegawai dan keutamaan keberhasilan oleh pegawai sebagian informan menjawab kurang baik karena mereka kurang memahami pekerjaan dengan baik dan sebagian juga mengatakan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa peran diposis dari aspek pelaksanaan tugas, komitmen pegawai, keberhasilan kebijakan sebagian besar informan memberikan jawaban bahwa selama ini baik, dan pemahaman tugas sebagian besar informan menjawab cukup baik sedangkan keputusan oprasional sebagian besar pegawai menjawab kurang baik mereka sendiri kurang memahami keputusan operasional tersebut.

4. Struktural Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk peran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup khususnya tentang pengelolaan Limbah cair Industri di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa terdapat informan yang menyatakan sangat baik, sedangkan sebagian besar informan menyatakan kurang baik karena akibat penggabungan bidang antara bidang pengendalian dan bidang penegakan hukum yang berbeda dengan latar belakang staf yang berbeda pula.

Promosi jabatan dalam rangka peningkatan karier pegawai juga telah mengurangi jumlah pegawai berpengalaman, kurangnya untuk mengikuti kursus pegawai pada program kursus Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Sementara itu perubahan struktur organisasi juga telah mempengaruhi pembagian tugas dimana terdapat sebagian informan menyatakan baik dan juga sebagai informan menyatakan kurang baik. Demikian pula dengan koordinasi unit kerja sebagai kecil informan menyatakan baik, sedangkan sebagian besar informan menyatakan kurang baik karena kurang berjalan dengan baik yang juga disebabkan oleh karena struktur kelembagaan yang berbentuk dinas. Tentang kewenangan dan tanggung jawab separuh informan menyatakan baik dan separuh informan lainnya menyatakan cukup baik. Demikian pula dengan aspek kesesuaian bidang informan menyatakan sesuai dan baik sebagaimana lainnya menyatakan kurang baik. selanjutnya tentang rasa saling mrnghargai pekerjaan separuh informan menyatakan baik, separuh informan lainnya menyatakan cukup.

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat tanggapan informan pada lokasi penelitian yang lebih dominan menyatakan struktur birokrasi baik pada aspek pembagian tugas, dan sesuai bidangnya dan tanggapan cukup baik pada aspek prosedur kerja, tanggung jawab dan saling menghargai pekerjaan sedangkan tanggapan bahwa struktur birokrasi kurang baik terhadap pada aspek pembagian tugas dan koordinasi antar unit kerja antara instansi karena stuktur organisasi yang

berbentuk dinas dan telah digabungkan dengan dinas lain.

Permasalahan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi dan Disposisi tersebut merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal proses pengendalian limbah cair di Kabupaten Bandung sebagai termuat dalam Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2010. Pada dimensi komunikasi pada intinya memiliki indikator khususnya seperti penyampaian informasi oleh pimpinan dimana hasil wawancara menyatakan bahwa informasi dari pimpinan kepada bawahan baik dan jelas dengan tingkat frekwensi yang cukup baik. Hal ini berarti bahwa kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahan atau kekeliruan bawahan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah khususnya pengendalian limbah cair. Pada dimensi sumber daya yang merupakan gabungan seluruh potensi berupa dana dan daya serta peralatan yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Keadaan pegawai sebagai sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berdasarkan hasil wawancara bahwa dari sisi jumlah, pegawai sudah cukup baik namun dari sisi kualitas dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan daerah masih tergolong kurang memadai. Pada aspek pembiayaan yang diperlukan guna operasional kegiatan tergolong belum cukup baik dalam hal ini perlu perbaikan dan peningkatan sumber pembiayaan yang

mendukung implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Demikian pula peralatan (sarana prasarana) yang diperlukan untuk sementara berdasarkan hasil penelitian ternyata pada mulanya peralatan sangat terbatas namun sedikit demi sedikit tersedia dan sedang diupayakan untuk peningkatan baik jumlah maupun mutu sehingga keadaan peralatan pada saat penelitian dilakukan melalui pengamatan dilapangan ternyata sudah hampir mencukupi sehingga diharapkan proses pembuangan limbah cair akan segera dapat berjalan dengan baik. Hanya saja sampai saat penelitian berlangsung juga keadaan tenaga pengelolaan laboratorium pengendalian limbah cair yang berpengalaman belum tersedia sehingga proses pembuangan mutu limbah cair belum dapat berjalan secara maksimal. Faktor lain juga yang memainkan peran dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada proses pembuangan limbah cair di Kabupaten Bandung adalah disposisi atau kecenderungan dimana sikap pegawai juga mempengaruhi kegiatan organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung dapat berjalan atau tidak juga ditentukan oleh bagaimana para pelaksana kebijakan dapat mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Dukungan terhadap kebijakan ini tercipta karena pelaksana kebijakan cukup memahami tugasnya dengan baik dan selain itu mereka dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari data yang didapatkan bahwa sebagian pelaksana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bandung telah memiliki komitmen dan

mengutamakan keberhasilan dengan cukup baik terhadap tugasnya walaupun harus dengan kepemimpinan yang tegas. Faktor disposisi mengandung makna *effect of disposition* (efek disposisi), *staffing the bureaucracy* (pegawai birokrasi), dan *incentives* (insentif), maka nampak bahwa faktor disposisi khususnya tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas oleh para biokrat pelaksana kebijakan pada umumnya belum cukup baik dan belum memungkinkan yang berarti faktor disposisi juga merupakan hal penting yang ikut berperan dalam proses pembuangan limbah cair. Struktur birokrasi menjadi salah satu faktor kritis atau aspek yang juga ikut berperan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya proses pembuangan limbah cair di Kabupaten Bandung. Struktur birokrasi dalam perannya terdapat indikator khususnya yang meliputi pembagian tugas dimana terdapat separuh mnrilai baik sementara separuhnya menilai kurang baik.

Proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pembuangan limbah cair industri menurut hasil pengamatan bahwa nampaknya implementasi kebijakan pembuangan limbah cair industri ini belum baik sesuai harapan. Hal ini disebabkan:

a. Target kebijakan pengelolaan (pengendalian) lingkungan hidup ini sebagaimana termuat dalam judul maupun isi adalah sebagai sarana perolehan pendapatan asli daerah sektor lingkungan hidup yang bersumber dari

retribusi atas ijin pembuangan dan lokasi pembuangan limbah cair industri.

- b. Maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan (pengendalian) lingkungan hidup tersebut adalah demi kepentingan dan keselamatan lingkungan hidup khususnya sumber air bagi makhluk hidup (fauna dan flora) yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Namun dalam kebijakan pengelolaan ini terdapat ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan untuk melindungi kepentingan kehidupan makhluk hidup sementara isi kebijakannya lenih kepada upaya peningkatan pendapatan.
- c. Sasaran kebijakan pengelolaan (pengendalian) lingkungan hidup ini belum menyelutuh untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini nampaknya hanya diberlakukan bagi usaha/kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha baik oleh swasta maupun pemerintah, sedangkan masyarakat secara perorangan maupun kelompok belum dapat dijangkau oleh kebijakan ini. Sementara limbah domestic maupun industri rumah tangga juga berkemungkinan mengandung B3 (bahan Berbahaya Beracun) seperti

pabrik tahu, kandang ternak dan lain sebagainya.

7. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri di Wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2010 serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.

b. Saran

Diperlukan sinergitas antar Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat khususnya Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah

khususnya proses pengendalian limbah cair di daerah Majalaya.

Daftar Pustaka

Handoko, Hani, 1995, *Manajemen*. Yogyakarta : BFFE. Bumi Aksara.

Hosio, J.E., 2006, *Kebijakan Publik Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.

Lubis, M.S., 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.

Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W UNPAD

Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.